KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 14/KPT.W32.U/ SK.KP1.1.3/III/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC
TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXI TAHUN 2024
PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Kamar Pidana selaku Ketua Panitia Nomor 10/Pansel/*Ad Hoc* TPK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024, perihal Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tahap XXI Tahun 2024;

b. Bahwa untuk mengatur dan mempersiapkan penerimaan Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor dipandang perlu membentuk Panitia Daerah;

c. Bahwa pejabat dan pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Daerah untuk melaksanakan dan mempersiapkan penerimaan Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;

3. ....

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.
5. Peraturan Komisi Yudisial RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXI TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU;

KESATU : Membentuk Panitia Daerah untuk Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap XXI Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Panitia Daerah tersebut bertugas mengatur dan mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis sesuai Surat Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10/Pansel/*Ad Hoc* TPK/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 tentang Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXI Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 8 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau
Nomor : 14/KPT.W32.U/SK.KP4.1.3/III/2024
Tanggal : 8 Maret 2024

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XXI TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Erwin Mangatas Malau,S.H,M.H.	Ketua	Pelindung
2.	Dr. Syahlan S.H,M.H.	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	Priyanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	Ketua Tim
4.	Muhammad Ronaldi, S.T.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Rahmad Fahrozi, S.Kom., M.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Seksi Seleksi Berkas
6.	Mario Tyson Nadapdap, S.E.	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Seksi Penerimaan Lamaran
7.	Riko Arianto, S.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi
8.	Revanda Fitra Inanta, S.Kom.	PPNPN	Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada 8 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN TINGGI
KEPULAUAN RIAU

ERWIN MANGATAS MALAU

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.